

DAFTAR PUSTAKA

- Amadt. 2000. tentang Bentuk Kelembagaan dan pendanaan kerjasama skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Jurnal.
- Balai Pustaka. 1989. Pengertian dari kata sistem. Kamus umum bahasa Indonesia : [18].
- Balai Pustaka. 1989. Pengertian dari kata kelembagaan. Kamus umum bahasa Indonesia : [219].
- Bank Dunia. 1994. tentang latar belakang diadakannya kerjasama. (asagenerasiku.blogspot/2012/03/macam-macam-kerjasama-antar-negara.html)(Diakses selasa, 27 maret 2012 pukul 10.30 wib)
- Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). 2016. Struktur Organisasi Pengelola Jalan Tol.. website ([http://: bpjt.com](http://bpjt.com)).
- Baskoro. 2000. Alternatif model kebijakan penataan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional : (kajian terhadap jalinan kerja dan kemitraan lembaga untuk pemapanan sistem inovasi nasional). Tesis (Magister) – Universitas Indonesia. 2000.
- Cantos. 1999. *Regulating Privatized Rail Transport, The World Bank : Economic Development Istitute.*
- Divre II Provinsi Sumatera Barat. 2011. *Bahan Paparan Divre II Sumbar* . Laporan akhir. Simpang Haru Padang : Kantor KAI Divre II Sumatera Barat.
- Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat. 2006. *Tataran Transportasi Wilayah Propinsi Sumatera Barat.* Padang : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
- Departemen Perhubungan (Dep.Hub) Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 2010. *Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Shortcut Jalur Kereta Api Solok – Padang.* Padang : Dinas Perhubungan Sumatera Barat
- Departemen Perhubungan (Dep. Hub), Direktorat jenderal Perkeretaapian. 2001. Himpunan Keputusan Menteri Perhubungan di Bidang Perkeretaapian, Biro Hukum dan Organisasi, Jakarta : Sekretariat Negara.
- Departemen Perhubungan (Dep. Hub) Ditjen Perkeretaapian 2010. *Buku -8A Laporan Akhir (Final Report).* Padang : PT. Jasakons Putra Utama.
- Departemen Perhubungan (Dep. Hub) Ditjen Perkereta Apian. 2011. Dokumen rencana induk perkereta apian nasional (RIPN), Jakarta : Sekretariat Negara.
- Europe PMC. 1998. Kinetics of cytokine production in experimental autoimmune anterior uveitis (EAAU). Department of Ophthalmology and visual, Washington University School of Medicine, st. Louis, MO 63110, USA.

Eva, Ledia. 2013, Pemilihan Bentuk Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam Investasi Pembangunan *Shortcut* Padang –Solok menggunakan Analytic Network Process (ANP), Tesis Magister Teknik, Limau Manis Padang :Universita Andalas.

Ewoud Verhoef. Pengertian dari kata infrastruktur. Belanda : Pakar Institusi Belanda.

Grimsey, et al. 2000. *Evaluating The Risk of Public Private Partnerships for Infrastructure Projects. International Journal of Project Management*. 2002. Halaman : 107-118.

Hardi, Wijaya. 2015, “Penentuan tarif angkutan barang moda kereta api jalur padang – solok, Tesis Magister Teknik, Limau Manis : Universitas Andalas.

Her Majesty's Stationery Office (HMSO).2000. Tujuan diadakannya kerjasama. Inggris : *HMSO*.

Her Majesty's Stationery Office (HMSO).2001. Buku Latar belakang dilakukan kerjasama. Inggris : *HMSO*.

John M Rebels dkk. 1989. pengertian dari kata sistem. Kamus Inggris-Indonesia : Halaman [575].

Keputusan Presiden Republik indonesia No. 7. 1998. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan Atau Pengelolaan Infrastruktur. Jakarta : Sekretariat Negara.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 33. 1992. Tata Cara Penanaman Modal. Jakarta : Sekretariat Negara.

Kementrian Perhubungan Ditjen Perkeretaapian. 2011. *Rencana Induk Perkeretaapian Nasional*. (<http://perkeretaapian.dephub.go.id/dmdocuments/RIPNAS-FINAL.pdf>). (Diakses 23 Juli 2016 pukul 10.00 wib)

Keputusan Presiden Republik Indonesia.No.17. 2000.Tentang pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara. Jakarta : Sekretariat Negara.

Khusyu dkk. 1998. Tentang Perkembangan Perkereta Apian Negara Jepang. Kajian Pakar Perkereta Apian Jepang.

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Institut Teknologi Bandung (LPPM – ITB). 2001. Studi Pengertian Infrastruktur secara umum. Jakarta. Institut Teknologi Bandung.

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Institut Teknologi Bandung (LPPM – ITB). 2002. Studi Kebutuhan Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana Wilayah lain Memenuhi Kebutuhan Minimal Prasarana Wilayah. Seminar Nasional. Strategi Pemenuhan Kebutuhan dan Penentuan Prioritas Pengembangan Infrastrukt wilayah. Jakarta.

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Institut Teknologi Bandung (LPPM ITB). 2002. Studi Mobilisasi Sumberdaya dalam Pengembangan Kerjasama PT, KAI dengan Pusat Penelitian Transportasi dan Komunikasi.

Muhammadi. 2001. Lingkungan Hidup, Sosial, Ekonomi, Manajemen. Jurnal Analisis Sistem Dinamis. Jakarta : Universitas Muhammadiyah Jakarta Press

Muhammadi. 2001. pengertian dari kata sistem. Jakarta : Universitas Muhammadiyah Jakarta Press.

Nusa. 2001. Tentang Aspek Hukum dan Bentuk Kerjasama. Artikel (<https://baranusastiowordprescom.wordpress.com/2016/07/17/aspek-hukum-usaha-bank-di-indonesia/>.)

Partnerships, World Food Program and Partner (WFP). 2002. *How Partnerships Work. Term Related To Public-Private Partners.*

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 38. 2015. Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Jakarta : Sekretariat Negara

Peraturan Menteri Perhubungan No. 83. 2010. Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi, Jakarta : Kantor Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50. 2007. Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, Jakarta : Sekretariat Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22. 2009. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. Jakarta : Kantor Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22. 2011. Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, Jakarta : Kantor Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No. 12. 1998. Tentang organisasi PERSERO dan uraian tugas. Jakarta : Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No. 69. 1998. Tentang pembentukan Direktorat perkereta apian dibawah Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan. Jakarta : Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No. 69. 1998. Prasarana dan sarana kereta api. Jakarta : Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah. No. 12. 1998. Perubahan organisasi persero. Jakarta : Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah. No. 19. 1998. Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) kereta api menjadi Perusahaan Persero. Jakarta : Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah. No. 27. 1963. Pemerintah mengubah status DKA menjadi PNKA. Jakarta : Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah. No. 57. 1990. Perubahan PNKA menjadi Perumka. Jakarta : Sekretariat Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. 2005. Tentang prinsip penyelenggaraan jalan tol Medan – Binjai. Jakarta : Sekretariat Negara.

PP No. 19. 1998. Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Jakarta : Sekretariat Negara.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sekolah Tinggi Pramita (P3ST Pramita). 2002. PreFS Pengembangan Jaringan Kereta Api Propinsi Banten. Laporan Akhir. Banten : Kerjasama Pemerintah Provinsi Banten dengan Pusat Penelitian dan pengembangan Sekolah Tinggi Pramita.

PUSPAR-UGM. 2001. Kajian Strategi Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Indonesia. *Laporan Internal*. Yogyakarta : Kantor Menteri Koordinator Perekonomian RI.

PT.KA.2000-2004. *Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)*. Bandung : PT. KA Pusat.

Reksohadiprojo dkk. 1986. Pengertian dari kata kelembagaan. Buku dasar-dasar manajemen : Halaman [15].

Roger. 1999. Latar belakang diadakan kerjasama. (<http://www.ukm.my/geografia/image/upload/6.2010-3-jalaludin-melayu-1.pdf>)

Riko Yuliardi. 2015. Dokumen kontrak kerjasama pemerintah swasta untuk investasi infrastruktur Study Kasus Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api *Shortcut* Padang – Solok. Tesis Magister Teknik. Limau Manis Padang : Universitas Andalas.

Smith dkk. 1996. Bentuk dan inisiatif kerjasama pemerintah swasta dan Manajemen proyek dari konseptual sampai dengan operasional. Jakarta : Erlangga Jakarta.

Soeharto. 1997. Manajemen proyek dari konseptual sampai dengan operasional. Jakarta : Erlangga Jakarta.

Sunaryo, 1995. strategi peningkatan pelayanan air minum dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta. (<http://www.scribd.com/document/98489110/Buku-Putih-Kerjasama-Swasta-dan-Pemerintah-dalam-Penyediaan-Air-Minum>.)

Susantono. 2001. Tentang gambaran terpuruknya sektor finansial dan sektor Riil akibat krisis ekonomi. (<http://lib.ui.ac.id/file=digital/123624-R010855-Kajian%20studi-Literatur.Pdf>.)

Syawaludin. 2011. Sejarah panjang kereta api. (<http://sumbarpost.com/berita-402-sejarah-panjang-kereta-api.html#.TuVOSrJam40>).

(Diakses 12 oktober 2011 pukul 08 :00 wib).

Tri Sefrus. 2013. *Estimasi demand* angkutan barang jalur padang-solok dari peralihan *truck* ke kereta api sebagai pembangunan proyek kerjasama pemerintah swasta. Tesis Magister Teknik. Limau Manis : Universitas Andalas.

Team KPS. 2002. Contoh Perusahaan yang menggunakan kerjasama pemerintah swasta (KPS). Laporan Team KPS.

Thompson dkk. 1998. Tentang Perkembangan kerjasama perkereta apian diluar Negeri. Jurnal

Tiong. 1995. Alokasi resiko dari skema kontrak *Leasing* (Kontrak Sewa). (<http://document.tips/documents/lengkap-55a23226f0004.html>)

Tynam. 1999. Tentang Bentuk skema kerjasama *Public Private Partnership (PPP)* yang sring dipilih adalah skema *Build Operate and Transfer (BOT)*.

UU Republik Indonesia Nomor 13. 1992. Perkereta Apian. Jakarta : Sekretariat Negara.

UU Republik Indonesia Nomor 18. 1999. Jasa Konstruksi. Jakarta : Sekretariat Negara.

UU Republik Indonesia Nomor 19. 1998. Bentuk Organisasi Persero. Jakarta : Sekretariat Negara.

UU Republik Indonesia Nomor 22. 1999. Pemerintahan Daerah. Jakarta : Sekretariat Negara.

UU Republik Indonesia Nomor 25. 1999. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta : Sekretariat Negara.

UU Republik Indonesia Nomor 56. 2009. Penyelenggaraan Perkereta Apian. Jakarta : Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23. 2007.. Perkeretaapian. Jakarta : Sekretariat Negara.

Undang- undang Republik Indonesia. No. 19. 1998. Perubahan organisasi persero kereta api. Jakarta : Sekretariat Negara.

Undang-undang Perusahaan Negara.No.419.1927.Perubahan organisasi dan peraturan penyelenggaraannya. Jakarta : Sekretariat Negara.

Undang-undang Republik Indonesia. 2004. Tentang prinsip penyelenggaraan jalan tol Medan – Binjai. Jakarta : Sekretariat Negara.

Undang-undang Republik Indonesia. No. 1. 1995. Tentang Perseroan Terbatas (PT). Jakarta : Sekretariat Negara.

Undang-Undang. No. 19. 1960. Hukum dagang/ hukum privat dan perubahan status mengindikasikan perubahan strategis perusahaan kereta api. Jakarta : Sekretariat Negara.

War dan Smith. 1995. Tentang Aspek Hukum dari bentuk -bentuk kerjasama. Jurnal.

Zaitul Mardini. 2014. Study Investasi Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api menggunakan Skema KPS Study Kasus : *Shortcut* Padang – Solok. Tesis Magister Teknik. Limau Manis : Universitas Andalas.